

## Pembangunan Desa Digital Berkelanjutan Di Desa Baros

Danis Tri Saputra Wahidin<sup>1</sup>, Mansur Juned<sup>2</sup>, Siti Maryam<sup>3</sup>, Chairun Nisa Zempi<sup>4</sup>, Aniqotul Ummah<sup>5</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVJ

Email

[daniswahidin@upnvj.ac.id](mailto:daniswahidin@upnvj.ac.id), [mansurjuned@upnvj.ac.id](mailto:mansurjuned@upnvj.ac.id),  
[aniqotulummah@upnvj.ac.id](mailto:aniqotulummah@upnvj.ac.id), [sitimaryam@upnvj.ac.id](mailto:sitimaryam@upnvj.ac.id), [nisazempi@upnvj.ac.id](mailto:nisazempi@upnvj.ac.id),

### ABSTRAK

Pembangunan desa digital memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Kesulitan itu didorong oleh berbagai faktor utama antara lain, rendahnya kompetensi dan pengetahuan, lemahnya tingkat ekonomi, sedikitnya fasilitas kesehatan publik, terbatasnya kemampuan finansial, dan terbatasnya akses marketing dari produk lokal. Selain itu digitalisasi desa mengalami stagnasi karena metode pembangunan yang parsial, tidak kooperatif dan non-partisipatif. Proses mitigasi kebutuhan desa digital melalui FGD masyarakat Desa Baros dengan tim dosen pengabdian FISIP UPNVJ merupakan awal dari proses pembangunan desa digital di Desa Baros dengan konsep pengembangan desa digital yang berkelanjutan, proses ini menemukan bahwa kebutuhan utama masyarakat Baros adalah pengembangan website desa, pelayanan administrasi pemerintahan dan penguatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan Baros.

**Kata kunci : Pembangunan, desa digital, berkelanjutan, FGD , kebutuhan masyarakat desa**

### ABSTRACT

*The development of a digital village has a very high complexity. This difficulty is driven by various main factors among others, low competence and knowledge, weak economic level, few public health facilities, limited financial capacity, limited access to marketing of local products. In addition, village digitization has stagnated due to partial, non-cooperative and non-participatory development methods. The process of mitigating the needs of digital villages through FGDs for the Baros Village community with a team of FISIP UPNVJ service lecturers is a digital village development process in Baros Village with the concept of sustainable digital village development, this process found that the main needs of the Baros community are website development, government administration services and business strengthening the economy of the Baros rural community.*

*Keywords: Development, digital village, sustainable, FGD, village community needs*

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan covid-19 yang pernah dihadapi masyarakat semakin meyakinkan publik bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dengan cepat. Pembangunan dengan pendekatan digitalisasi tidak hanya dapat dikembangkan di wilayah perkotaan bahkan dapat dilakukan hingga ke wilayah pedesaan. Kesuksesan transformasi digital dirasakan oleh Korea Selatan, kesiapan infrastruktur digital mendorong pembangunan strategis yang fokus pada sektor digital dan industri hijau. Pemerintah Korea Selatan mewajibkan operator komunikasi untuk menyediakan layanan internet yang kuat di pedesaan, semua itu dilakukan agar terjadi pengurangan kesenjangan digital antara kota dengan desa, dan semuaarganya dapat menggunakan internet untuk kebutuhan mendapatkan informasi, perdagangan keuangan dan belanja online. (tempo:2020).

Potensi ekonomi digital di Indonesia sendiri sangat besar berdasarkan data Google, Temasek, dan Bain & Company 2020, total ekonomi digital Indonesia pada 2020 adalah US\$ 44 juta atau setara Rp 631 triliun, dan akan meningkat pada 2025 menjadi US\$ 124 atau setara Rp 1.744 triliun. (CNBCIndonesia: 2021). Kondisi ini akan meluas seiring dengan kemampuan masyarakat desa memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk membangun ekonomi lokalnya berbasis digital.

Implementasi digitalisasi desa di Indonesia telah diakomodasi oleh kebijakan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 6 ayat 2/a, serta Permendes No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa pasal 11 ayat 1 – 5. implementasinya meluas hingga ke desa-desa terpencil dengan pembuatan website sebagai upaya utama.

Namun demikian, berdasarkan pada penelitian Aniqotul Ummah, Siti Maryam dan Danis Tri Saputra Wahidin (2022), Implementasinya terutama pada konteks e-

government cenderung tidak efektif dan dipaksakan serta permasalahannya terus berulang seperti pengembangan desa digital yang hanya berbasis website yang seadanya, tidak bisa dibuka, dan tidak bisa digunakan untuk pengembangan lainnya.

Padahal pengembangan desa digital dapat meluas pada penggunaan aplikasi pintar untuk pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan atau promosi produk unggulan desa dan pengembangan koperasi atau BUMD digital.

Kondisi ini terjadi karena faktor masyarakat pedesaan yang masih terbatas. Menurut Susanto et.al., (1992) dan Cintamulya (2015), masyarakat pedesaan memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat;
2. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat;
3. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat;
4. Terbatasnya akses pembiayaan baik untuk akses pendanaan, maupun layanan keuangan lainnya seperti pengiriman uang;
5. Terbatasnya akses pemasaran produk lokal. Lebih jauh lagi, fenomena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah daerah pedesaan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Selain itu, kesenjangan penggunaan internet dan komputer masih terjadi di Indonesia, Data dari *International Telecommunication Union (ITU)* tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kesenjangan akses jaringan internet dan juga kesenjangan akses terhadap komputer. Hanya 53,7 persen penduduk yang menggunakan internet dan 18,8 persen memiliki akses laptop. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saat ini ada 13 ribu desa yang masih belum memiliki akses internet.

Hambatan tersebut secara umum menurut azis (2008) terjadi karena belum kuatnya 3 aspek penting dalam mengimplementasikan e-government terutama di wilayah pedesaan yaitu 1) aspek infrastruktur berupa kesenjangan digital, kurangnya sistem pelayanan, kurangnya infrastruktur pendukung, 2)

aspek budaya berupa penolakan masyarakat terhadap digitalisasi, Ketidakinginan untuk berbagi data dan informasi, dan 3) aspek kepemimpinan, berupa konflik politik, anggaran, regulasi dan standarisasi.

Namun demikian, Desa Baros yang terletak di Kecamatan Baros Kabupaten Serang memiliki modalitas sosial dan politik yang menarik sehingga memiliki kelayakan untuk dikembangkan pola pembangunan desa digital. Posisinya yang dekat dengan pemerintahan provinsi Banten menjadikan infrastruktur digitalnya kembang dengan baik, kultur masyarakat yang cukup terdidik dan memiliki orientasi pekerjaan yang bervariasi, selain itu, dukungan pemerintahan untuk pengembangan desa digital juga cukup baik, sehingga pola pengembangan desa digital dapat dilakukan dengan baik. Permasalahan utama yang dihadapi lebih terlihat pada keberlanjutan pengembangan desa digital sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat Desa Baros.

## 2. PERMASALAHAN

berdasarkan pada penelitian Aniqotul Ummah, Siti Maryam dan Danis Tri Saputra Wahidin (2022), Implementasi desa digital terutama pada konteks *e-government* cenderung tidak efektif dan dipaksakan serta permasalahannya terus berulang seperti pengembangan desa digital yang hanya berbasis website yang seadanya, tidak bisa dibuka, dan tidak bisa digunakan untuk pengembangan lainnya. Padahal pengembangan desa digital dapat meluas pada penggunaan aplikasi pintar untuk pemberdayaan sektor pertanian dan perikanan atau promosi produk unggulan desa dan pengembangan koperasi atau BUMD digital.

Berdasarkan kajian awal dari kunjungan tim pengabdian FISIP UPNVJ, desa digital merupakan salah satu konsentrasi pembangunan Desa Baros yang sedang diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Baros, namun pelaksanaannya terkendala dan menyebabkannya tertunda, sehingga pihak desa membutuhkan bantuan untuk

menjadikannya sebagai pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable local development*) dan bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat Desa Baros.

## 3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dengan metode partisipatif dengan berupaya membangun pola kolaboratif berbasis pembangunan komunitas sehingga terbangun pola pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan “Desa Digital” yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat Desa Baros yang terletak di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pembangunan Menurut Todaro (Kenny 2006:11), memiliki tujuan utama yaitu, (1) Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang untuk menunjang kehidupan, seperti pangan dan perumahan, (2) menaikkan standar hidup, termasuk meningkatkan perhatian terhadap nilai-nilai budaya sebagaimana halnya dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, (3) Memperluas skala ekonomi dan pilihan sosial dalam masyarakat, Menurut Doyal dan Gough (1991) kebutuhan yang harus dipenuhi manusia tidak hanya berupa kebutuhan fisik, namun juga kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Pada konteks pembangunan masyarakat (*Community Development*) secara umum, konsep ini terjadi pada era kolonial dan dipergunakan secara masif oleh pemerintahan Inggris pada tahun 1925 untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah koloni pada saat itu. Pemerintah Inggris mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas.

Istilah pembangunan masyarakat (*community development*) menurut Conyers (1991) telah digunakan secara internasional dalam arti sebagai proses atau sebagai usaha swadaya masyarakat yang digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi,

sosial dan kultural serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada kedalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut terbantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa

Sedangkan menurut Arthur Durham (1958) istilah ini dapat diartikan sebagai usaha terorganisasi untuk memajukan kondisi dan kehidupan masyarakat pada integrasi komunitas dan kemandiriannya. *Community development* berusaha berkerja pada sektor prioritas melalui pengorganisasian bantuan Mandiri dan upaya kerjasama dari sebuah komunitas pedesaan, tetapi biasanya pendanaannya berasal dari pemerintah atau organisasi sukarela. *Community development* memiliki ciri-ciri utama pada 1) Pengembangan kemandirian masyarakat sebagai subjek, atau pelaku utama pembangunan masyarakat 2) Berbasis sumber daya setempat untuk meningkatkan potensi dan sumber daya desa, 3) berkelanjutan dan dilaksanakan secara terus menerus.

Terdapat 3 komunitas utama yang didorong dan dikembangkan untuk mengembangkan desa digital bagi kesejahteraan masyarakat Desa Baros, yaitu 1) Komunitas Karang Taruna, 2) Komunitas Ibu-ibu, dan 3) komunitas pekerja dan petani yang ada di Desa Baros, dan diperkuat dengan dorongan dan bantuan Pemerintah Desa Baros.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pembangunan Berkelanjutan**

Pada konteks Global, masyarakat dunia merespon berbagai permasalahan dunia melalui program pembangunan yang dilakukan secara kolektif dan menyeluruh. Pembangunan menurut Faqih (2011) merupakan ikhtiar perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, upaya peningkatan kehidupan ekonomi, politik, budaya, serta infrastruktur masyarakat. Upaya pembangunan bersama tersebut merupakan respon bersama yang mulai dilakukan secara sistematis dengan dituangkannya deklarasi bersama pada tahun 2000 yang dikenal dengan The Millenium Development Goals (MDG's). Sebelum dicanangkan MDG's telah ada

berbagai upaya pembangunan dunia yang ditetapkan pada dekade 1960-an hingga 1980-an. Tujuan pembangunan tersebut diperkuat melalui konfrensi global PBB pada tahun 1990-an termasuk didalamnya KTT Dunia untuk anak, konfrensi dunia tentang pendidikan untuk semua pada tahun 1990 di Jomtien, Konfrensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, serta KTT dunia untuk pembangunan sosial 1995 di Copenhagen (Widjodjo, dkk., 2004). MDG's tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan pembangunan sebelumnya, program ini dicanangkan dalam tujuan pembangunan global (IDG) oleh negara-negara maju yang tergabung dalam OECD dan diadopsi oleh PBB, Bank Dunia, dan IMF pada tahun 1996 (UN, 2000).

MDG's memiliki 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator yang hendak dicapai hingga tahun 2015. Pelaksanaan MDG's berakhir dengan hasil yang memuaskan dan berhasil mengurangi setengah dari angka kemiskinan dunia. Laporan MDG's Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan adanya penurunan rasio gini dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) dari 20,60% pada Tahun 1990 menjadi 5,90% pada Tahun 2008. Ketimpangan Pendidikan SD Sampai perguruan tinggi menurun, Penurunan juga terjadi pada tingkat kematian akibat malaria (BPS,2015). Sedangkan beberapa hal yang Masih menjadi tugas rumah adalah angka kemiskinan nasional yang masih jauh dari target MDG's sebesar 7,55%, Masih adanya konsumsi kalori dibawah tingkat konsumsi minimum, Masih tingginya angka kematian balita, bayi dan ibu, masih belum komprehensifnya pengetahuan publik mengenai HIV dan AIDS serta jumlah emisi kanbondioksida yang masih melebihi dari target yang ditetapkan. (Halim Iskandar. A,2020).

SDG's menjadi transformasi program MDG's yang disepakati negara-negara dunia sebagai program pembangunan global melanjutkan MDG's. Pertemuan negara-negara PBB yang diwakili oleh 193 negara melakukan pertemuan yang dikenal dengan *Sustainable Development Summit* yang menyepakati dokumen pembangunan lanjutan yang disebut *Sustainable*

*Development Goals (SDG's)*, program pembangunan global ini memuat 17 tujuan dan 169 target yang saling terintegrasi, saling mempengaruhi, inklusif, universal dan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan (*no one left behind*) dengan jangka waktu pencapaian hingga tahun 2030. Berikut adalah gambar transformasi tujuan dan target MDGs menuju SDG's sebagai berikut :

**Gambar 1. Perubahan MDG's menjadi SDG's**



Sumber : Global Strategies for the Prevention and Control of Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases, (Hiroki Nakatani:2016)

SDG's memiliki lima prinsip-prinsip dasar yang mencoba membangun keseimbangan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dikenal dengan 5 P (UN, 2015), yaitu :

1. *People* atau manusia, pembangunan global menempatkan manusia sebagai perhatian utama.
2. *Planet* atau Bumi, Pembangunan berorientasi pada perlindungan terhadap planet bumi dari segala bentuk kerusakan yang merugikan melalui produksi, konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, serta mengambil aksi penting dan strategis terkait perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.
3. *Prosperity* atau Kesejahteraan, memastikan semua manusia mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, teknologi,

pendidikan maupun kesehatan serta terjadi harmoni atau keselarasan dengan alam.

4. *Peace* atau perdamaian, pembangunan harus dapat memberi arah pada terbinanya perdamaian, keadilan, serta terbangunnya masyarakat inklusif yang bebas dari ketakutan dan kekerasan.
5. *Partnership* atau kemitraan, Pembangunan diimplementasikan dengan strategi memobilisasi, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta dunia internasional untuk pencapaian tujuan Pembangunan global.

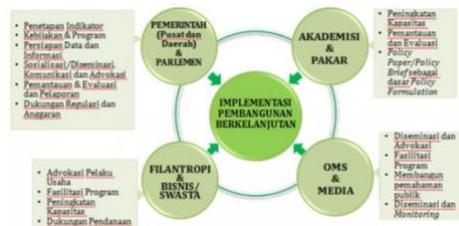
Karakteristik pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam melakukan pembangunan menurut Budimanta (2005, h.7) adalah sebagai berikut: (1) Cara berpikir yang integratif, pembangunan harus melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, maupun melaksanakan pembangunan; (2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek; (3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang; dan (4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain.

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kemitraan yang kuat sehingga dapat saling menguntungkan satu dengan yang lain. Menurut Hafsah (2000, h.43) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas maka aktor-aktor pembangunan menjadi penting untuk berkolaborasi dan terlibat bersama dalam proses pembangunan. Aktor-aktor tersebut terlibat dalam semua proses perencanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporannya. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia terdiri dari empat platform yaitu : Pemerintah dan parlemen, Akademisi dan pakar, Organisasi kemasyarakatan dan Media, Filantropi dan pelaku usaha. (Bappenas, 2016). Peran-peran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2. Aktor-aktor Pembangunan Berkelanjutan**



Sumber : Bappenas, 2016

#### 4.2. SDG's Desa

Implementasi SDG's Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres no 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada perpres tersebut SDGs Desa disusun untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat implementasi permendesa PDTT no 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Penetapan UU no. 6 tahun 2014 tentang desa telah merubah paradigma pembangunan desa dari pola pembangunan desa sebagai objek menjadikan desa sebagai subjek dan objek sekaligus. Sebelum UU Desa ini ditetapkan, menurut A. Halim Iskandar (2020) Masih banyak desa dengan status desa tertinggal. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa jumlah desa tertinggal mencapai 20.167 desa (27,22%) dari total

74.093 desa di Indonesia. Kedua, kemiskinan dipedesaan lebih besar dari perkotaan, 62,64% kemiskinan berada di desa. Ketiga, belum semua desa mendapatkan dukungan program Pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah pusat. Keempat, Masih terbatasnya infrastruktur di desa seperti posyandu, air minum, jamban, pasar desa, jalan aspal, sinyal telepon seluler, akses internet, lembaga perbankan dan BPR, angkutan umum, Jalan untuk dilalui roda empat atau lebih, Kelima, Masih rendahnya kualitas Pendidikan Masyarakat desa.

Kebijakan dana desa yang mencakup 74.093 desa dengan jumlah alokasi 20,67 Triliyun pada Tahun 2015 menjadi kebijakan pendanaan desa terbesar di dunia. Kebijakan itu semakin menguat seiring baiknya penyerapan desa bagi Pembangunan lokal. Pendanaan desa pada tahun 2019 tercatat meningkat menjadi 70,00 T dengan rata-rata per desa mendapatkan 933.9 juta. Selama lima Tahun terakhir menurut A. Halim Iskandar (2020) Masyarakat desa telah berhasil membangun diantaranya 231.709 kilometer jalan desa; 1.327.069 meter jembatan; 10.480 unit pasar desa, serta berbagai kebutuhan lainnya seperti posyandu, paud, MCK dan lain sebagainya.

Undang-Undang Desa memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut A. Halim Iskandar (2020):

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

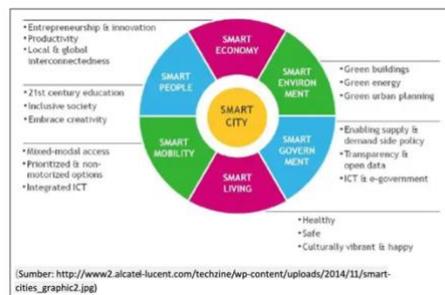
- SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
  3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
  4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
  5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
  6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
  7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
  8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

### 4.3 Desa Digital

Desa digital atau digitalisasi desa merupakan proses dari upaya pembangunan *smart Village* (Desa pintar) yang mengadopsi 6 konsep pengembangan *smart city* (Kota pintar). Namun demikian, pengembangan desa tidak dapat disamakan dengan kota dimana masyarakat desa masih homogen, memiliki berbagai keterbatasan ekonomi, budaya lokal yang kuat, dan kaya akan ekosistem lingkungan pedesaan, sehingga pengembangan *smart village* tetap harus menjaga kearifan lokal dan potensi desa

yang ada. Konsep pengembangan *smart city* tersebut adalah sebagai berikut :

**Gambar 3. 6 Dimensi Smart City**



Dimensi Smart City menurut Giffinger (2017) meliputi 6 (enam) dimensi smart yaitu *smart living, smart environment, smart mobility, smart governance, smart people, smart economy*. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan panduan untuk menyusun Masterplan Smart City melalui Gerakan 100 Smart City di Indonesia. Dalam panduan tersebut dimensi atau disebut dengan elemen meliputi *smart governance, smart society, smart economy, smart branding, smart living, dan smart environmental*. Pada dasarnya konsep smart city mencoba mengontrol secara terintegrasi semua fasilitas publik, bisnis, ekonomi, dan berbagai fasligas lainnya melalui pengendalian digital sehingga publik dapat menjangkau dan memanfaatkannya secara efisien dan mudas seria layak huni.

*Smart Village* merupakan penyangga dari *Smart Regency* dan *Smart City*, dengan integrasi digital. Smart Village memfokuskan diri pada sektor produksi berbasis ICT yang fokus pada pengembangan pertanian, peternakan, hortikultura, dan ikan yang disuplai kepada wilayah-wilayah lainnya, beberapa dikembangkan sebagai wilayah pariwisata sehingga pengembangan desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan percepatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki program membangun desa digital untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Arahan presiden ini menurut Wakil Menteri Budi

Arie Setiadi sesuai SDG's Desa nomor 17 yaitu tentang Kemitraan dan Pembangunan Desa yang berfokus pada teknologi dan informatika.

Menurut Rahmat Suyatna (2019), konsep desa digital mulai muncul ketika dana desa mulai masuk secara masif keseluruh desa di Indonesia. Harapannya saat desa terhubung dengan fasilitas internet maka desa akan menjadi lahan subur bagi penduduk untuk mencapai sebuah produktivitas dalam semua aspek kehidupan, selain itu pelayanan yang terintegrasi akan mampu memperbaiki dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Pemanfaatan desa digital meluas tidak hanya pada pelaksanaan pelayanan publik secara digital, tetapi juga dapat digunakan untuk mempromosikan sumberdaya desa, dan mempercepat transaksi penjualan berbagai komoditas desa. Namun demikian menurut Endra Wijaya (2013) perkembangan desa digital dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (1) tingkat Pendidikan Masyarakat, (2) Akses terhadap teknologi informasi, (3) Keseriusan pemerintah dalam menerapkan good e-government.

Menurut Worry Mambusy Manoby, dkk (2021) desa digital dapat memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan dan pengembangan desa, yaitu, (1) tata kelola desa menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel; (2) penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas; (3) meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita; (4) mengembangkan kapasitas individu warga desa; (5) peningkatan lapangan kerja dan kesempatan kerja; (6) budaya literasi digital berkembang sebagai kebutuhan publik; (7) pembangunan lebih didasarkan pada pemenuhan kebutuhan utama penduduk desa. (8) Aksesibilitas-konektivitas antar desa dan antar warga semakin baik dan lancar; dan (9) meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengelola potensi desa menjadi produk desa unggulan dan komoditas bernilai tinggi.

Implementasi desa digital tidak mudah, ada banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa saat

mengimplementasikan desa digital, diantaranya : 1. Infrastruktur digital yang masih belum baik, 2. Perekonomian masyarakat desa yang masih terbatas sehingga masyarakat belum dapat membeli alat-alat digital seperti handphone dan pulsa, 3. Literasi digital dan manajemen digital yang lemah, serta 4. Kemampuan enterpreunership yang lemah untuk pemanfaatan sumberdaya digital bagi pengelolaan potensi dan komoditas desa unggulan. Sehingga pembangunan desa digital memerlukan proses dan langkah yang panjang yaitu : 1) Pembangunan infrastruktur digital, 2) Pendidikan mengenai media dan pengelolaan digital, 3). Penguatan metode promosi dan bisnis digital, 4). Pembangunan desa digital yang partisipatif, kooperatif dan komprehensif serta 5). Penguatan mitra kerjasama untuk menjaga keberlangsungan desa digital.

### **Pengembangan Desa Digital di Desa Baros**

Desa Baros merupakan ibu kota dari kecamatan Baros yang terletak di kabupaten Serang. Lokasinya sangat potensial untuk berkembang dan maju karena tidak jauh dari pusat kota serang dan pusat kota Pandeglang, desa ini berada pada jalan utama yang menghubungkan Kota Serang dengan Pandeglang, pada umumnya penduduk Desa Baros merupakan penduduk yang berpendidikan dan memiliki kehidupan yang cukup layak. Terpaaan pandemi covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah pengangguran Desa Baros, tidak semua masyarakat produktif dapat terserap lapangan pekerjaan. Kondisi ini, bersamaan dengan kondisi perekonomian Banten yang goncang selama pandemi covid-19.

Pada umumnya penduduk Desa Baros beragama Islam yaitu sebanyak 6539 orang, 10 orang beragama Budha, 4 orang beragama Kristen dan 4 orang lainnya beragama Katolik. Secara historis, desa Baros pada awalnya adalah hutan atau "leweung". Dan mayoritas penduduknya adalah petani dan tukang kebun, namun seiring berjalannya waktu, pekerjaan mayoritas penduduknya berubah, sebagian ada yang menjadi buruh, pedagang, petani,

PNS dan pekerjaan lainnya. Berikut adalah data terbaru dari penduduk Desa Baros berdasarkan pekerjaannya :

**Tabel 1 Pekerjaan Penduduk Desa Baros**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan/ABRI/PNS	400 Orang
2	Wiraswasta/Pedagang	315 Orang
3	Tani	655 Orang
4	Pertukangan	26 Orang
5	Buruh Tani	50 orang
6	Pensiunan	10 orang
7	Jasa	75 Orang

Sumber : Data Desa Baros Tahun 2019

Saat ini, Proporsi penduduk Desa Baros seimbang antara penduduk laki-laki yang berjumlah 3427 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3130 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Baros (>90%) merupakan kelompok masyarakat produktif , kelompok ini terdiri dari 27,84% masyarakat pendidikan dan 72,16 masyarakat kelompok tenaga kerja. data tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Masyarakat Produktif di Desa Baros**

Kelompok Pendidikan			
No	Umur	Jumlah	Persentase
1	04-06 Tahun	240	4,12
2	07-12 Tahun	870	14,95
3	13-15 Tahun	510	8,76
Total			27,84
Kelompok Tenaga Kerja			
1	20-26 Tahun	1840	31,62
2	27-40 Tahun	1580	27,15
3	41-65 Tahun	780	13,40
Total			72,16

Sumber : Data Desa Baros Tahun 2019

<sup>1</sup> Ibid

Berdasarkan pendidikannya, penduduk berdasarkan data Desa Baros Tahun 2019, mayoritas penduduk merupakan tamatan SMA sebanyak 20,35%, diikuti tamatan SD sebanyak 16,11%, tamatan SMP 14,22%, dan tamatan perguruan tinggi sebanyak 2,91% sedangkan yang tidak sekolah dan putus sekolah sebanyak 4,33% , belum sekolah 8,%. Sisanya yang masih sekolah dibangku SD sebanyak 15,36%, pelajar SMA 12,36%, dan pelajar SMP sebanyak 10,41%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penduduk Desa baros merupakan penduduk yang berpendidikan dan memiliki kehidupan yang cukup layak. Berikut adalah foto Gedung serta kunjungan pendahuluan kami ke Desa Baros :

**Gambar 4. Gedung Pemerintahan Desa Baros**



Kondisi infrastruktur dan demografi masyarakat Baros yang baik menjadikan upaya pengembangan Desa digital kondusif dan prospektif, dengan metode penguatan edukasi , jaringan serta pengembangan pasar produk lokal. Selain itu, Terpaaan pandemi covid-19 telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah pengangguran Desa Baros, tidak semua masyarakat produktif dapat terserap lapangan pekerjaan. Kondisi ini, berbarengan dengan kondisi perekonomian Banten yang goncang selama pandemi covid-19. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor transportasi, pegudangan, pengadaan listrik dan gas, kemudian jasa lainnya dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 11,76 persen<sup>1</sup>. Meski begitu, BPS

mencatat beberapa lapangan usaha terkonfirmasi pertumbuhan positif. Khususnya yang terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,74 persen, diikuti pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,80 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,92 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,43 persen serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,85 persen. Namun karena pertumbuhan beberapa sektor ekonomi tersebut tidak seimbang dengan dengan penurunan berbagai sektor ekonomi lainnya sehingga perekonomian Provinsi Banten mengalami kontraksi sebanyak 7,40%. Bahkan pengangguran di Provinsi Banten disebutkan terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Posisi Desa Baros sebagai Desa sub urban telah memosisikannya pada berbagai permasalahan yang kompleks seperti :

1. Belum memiliki website desa sebagai etalase desa untuk mempromosikan produk lokal dan berbagai potensi lainnya agar mampu mengundang kalangan investor dalam mengoptimalisasi potensi desa
2. Menggunungnya sampah warga karena belum memiliki fasilitas pengelolaan bank sampah yang memadai
3. Belum terdapatnya BUMDES karena sumber daya desa yang minin
4. Belum memiliki koperasi warga yang baik sehingga banyak warga Desa Baros yang terlilit hutang rentenir dan pinjol
5. Pertanian warga Desa Baros yang tidak produktif dan memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan warga Desa Baros
6. Warga Desa Baros ingin membangun Desa mandiri digital agar mampu memberdayakan warganya, meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran yang terjadi di wilayahnya

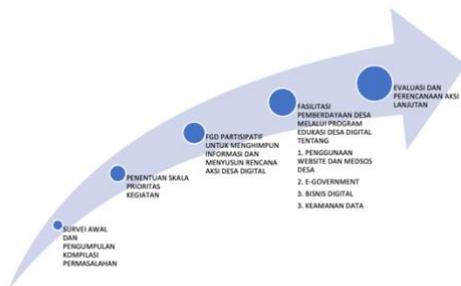
Berikut adalah gambar kunjungan tim saat melakukan studi awal kelayakan desa digital di Desa Baros :

**Gambar 2. Kunjungan pendahuluan dan Wawancara Pemerintah Desa Baros**



Melalui analisis potensi dan kebutuhan masyarakat, Desa digital dinggap sebagai kebutuhan yang paling prioritas dari masyarakat Desa Baros, karena desa digital mampu mempercepat perbaikan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan pola pembangunan yang berkelanjutan jika dilakukan secara partisipatif. Pola perencanaan dan pengembangan Desa digital di Desa Baros dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3. Pola Pengembangan partisipatif dan berkelanjutan Desa Digital Tahun Pertama di Desa Baros**



Untuk mengembangkan desa digital yang berkelanjutan, tim pengabdian berusaha melibatkan seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok Karang Taruna, kelompok ibu-ibu, kelompok pekerja dan petani melalui FGD yang bertema “Membangun Desa Baros menjadi Desa Digital Menuju Indonesia Emas 2045”.

Acara FGD dibuka pertama kali oleh Sekretaris kepala Desa Ibu Reny Purbasari, melalui acara ini beliau memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa Kepala Desa Baros menyambut baik terselenggaranya acara FGD membangun Desa Digital di Kota Baros, selain itu Kepala Desa berharap desa digital mampu menjadi jawaban dari perbaikan kesejahteraan masyarakat desa Baros. Berikut adalah foto saat Ibu Sekdes Desa Baros menyampaikan sambutannya pada acara FGD :

**Gambar 4. Ibu Sekdes saat menyampaikan sambutan mewakili Kepala Desa Baros**



Setelah pembukaan, acara FGD dilanjutkan dengan acara pemaparan awal oleh tim pengabdian dan para pembicara yang berasal dari lembaga pemerintahan terkait. Pemaparan materi diawali oleh tim pengabdian yang memaparkan latar belakang program, tujuan dan metode pelaksanaan pembangunan desa digital di Desa Baros. Pada kesempatan tersebut tim pengabdian menjelaskan bahwa pengembangan desa digital di Desa Baros merupakan upaya pembangunan yang harus dilakukan bersama-sama secara partisipatif, pengembangan ini diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Baros, pada pengembangannya di desa-desa lain, model ini terbukti mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, namun demikian pengembangan desa digital secara umum ditempatkan sebagai sentra produksi untuk mendukung pola pembangunan *smart village* atau desa pintar yang desa sebagai pemasok berbagai kebutuhan masyarakat secara luas, selain itu tim pengabdian juga menyampaikan

bahwa kekurangan yang paling harus diantisipasi oleh masyarakat adalah keharusan warga untuk menjaga keberlangsungannya dengan berbagai kegiatan produktif, sehingga kebutuhannya yang paling utama seperti jaringan internet, wifi, pulsa dan perangkat telekomunikasi dapat terpenuhi secara merata.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Agus Yasa Wirawan S.T, M.M perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten Serang yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang siap memfasilitasi kebutuhan website bagi pengembangan Desa Digital di Desa Baros, menurutnya lebih lanjut, membangun Desa Digital tidak mudah serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, masyarakat Baros harus memilih dan melakukan yang sesuai dengan kebutuhan warga karena pengembangan yang terlalu banyak akan dapat berdampak tidak baik dan mubazir. Selain itu pengembangan desa digital di Desa Baros harus dapat berdampak signifikan bagi pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemaparan Ketiga, disampaikan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Baros yaitu TB Jefri yang menyatakan bahwa pengembangan desa digital di Kecamatan Baros bukan merupakan desa pertama yang mengembangkan desa digital di kecamatan Baros, salah satu desa lain juga sudah mengembangkan desa digital namun sifatnya masih terbatas dan bekerjasama dengan Bank Jabar Banten untuk sektor perbankan. Harapannya pengembangan desa digital dapat memberikan kesempatan kepada warga untuk mengelola pelayanan publik secara cepat dan membantu pengembangan ekonomi warga serta menghindarkan masyarakat Desa Baros dari bahaya pinjaman online yang meraja lela dan meresahkan warga, selain itu beliau berpesan agar jangan sampai pengembangan digital menjadikan warga ketergantungan pada internet sehingga merusak budaya, moral dan perilaku-perilaku yang baik dari kehidupan masyarakat. Foto sesi pemaparan materi ini dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 5. Kegiatan Pemaparaan Materi FGD yang dihadiri pejabat Kabupaten Serang dan Kecamatan Baros**



Aspirasi masyarakat yang tertampung saat sesi tanya Jawab memperlihatkan bahwa semua warga Desa Baros sangat antusias dengan kegiatan pengembangan Desa Digital, seluruh warga berharap dengan dilaksanakannya Desa Digital, warga dapat menjadi sejahtera dan lebih baik kehidupannya. Kondisi ini terlihat dari aspirasi perwakilan masyarakat yang terekam melalui FGD, beberapa perwakilan masyarakat tersebut menyampaikan beberapa aspirasi pengembangan sebagai berikut :

**Tabel 3 Daftar Aspirasi Warga Desa Baros**

No	Aspirasi	Rencana Tindak lanjut
1	Pengembangan Website Desa Baros	Website belum ada namun sudah dapat disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Serang
2	Digitalisasi administrasi Desa Baros	Tim pengabdian UPNVJ akan memulai pengembangan melalui penguatan kapasitas warga dalam pemanfaatan website dan pengelolaan e-Government

		melalui website dan sosial media
3	Peluasan pasar produk beras dan cabai merah	Tim pengabdian UPNVJ memperkenalkan metode dan manajemen bisnis digital berbasis website Desa

Pengembangan ini mengacu pada kesuksesan beberapa desa dalam mengembangkan Desa Digital serta kemampuannya dalam mengurangi emisi karbon dan mempercepat pengembangan ekonomi digital, seperti Korea Selatan dan China, sehingga beberapa sektor lain seperti media dan pihak swasta dianggap sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pengembangan Desa Baros agar dapat tergaliasai dengan baik dan berkesinambungan. Penutupan acara FGD ini dapat terlihat pada foto dibawah ini :

**Gambar 6. Penutupsn Kegiatan Penyerapan**



Selain itu, beberapa penemuan penting tentang pengembangan Desa Digital di beberapa desa di Indonesia juga menjadi catatan penting diantaranya :

1. Pengembangan Desa Digital yang stagnan di Indonesia karena warga tidak mampu mengoptimalkan peran berbagai perangkat digital untuk kebaikan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman warga desa yang

- belum konprehensif mengenai desa digital.
2. Penguatan infrastruktur digital di Indonesia yang masih lemah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia yang belum baik.
  3. Pengembangan Desa Digital yang belum memiliki relasi symbiosis dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sehingga perlu penguatan pengembangan relasi desa digital dengan ekonomi desa

Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi pengembangan Desa Digital di Desa Baros. Namun demikian, FGD ini menjadi awal dalam mengawal proses dan pengembangan Desa Digital yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas di Tahun 2045.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pengabdian masyarakat di Desa Baros terlihat bahwa pengembangan desa digital di Desa Baros sangat dibutuhkan oleh warga, namun pengembangan desa digital tidak mudah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah : (1) rendahnya kompetensi dan pengetahuan masyarakat Desa Baros tentang digitalisasi, (2) Lemahnya tingkat ekonomi warga, (3) Rendahnya fasilitas kesehatan publik sehingga kesehatan masih menjadi prioritas pembangunan warga, (4) Terbatasnya kemampuan finansial warga, dan (5) Terbatasnya akses marketing dari produk lokal. Sehingga pengembangan desa digital akan memiliki kendala utama seperti : (1) Pengembangan Desa Digital yang stagnan di Indonesia karena warga tidak mampu mengoptimalkan peran berbagai perangkat digital untuk kebaikan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman warga desa yang belum konprehensif mengenai desa digital. (2) Penguatan infrastruktur digital di Indonesia yang masih lemah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia yang belum

baik. (3) Pengembangan Desa Digital yang belum memiliki relasi simbiosis dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal sehingga perlu penguatan pengembangan relasi desa digital dengan ekonomi desa. Sehingga pola-pola partisipatif dan kooperatif dengan 4 aktor utama seperti pemerintah, akademisi, NGO dan media, serta pihak swasta perlu dikembangkan lebih lanjut agar pengembangan desa digital di Desa Baros berjalan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Burhan Bungin, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana. Edisi Kedua

Hikmat, Harry. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press, Edisi Revisi

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora

Isbandi. 2012. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada  
Isbandi. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Depok: FISIP UI Press.

Isbandi. 2010. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Jakarta.

Jim Ife. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
M. Anwas, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta

Maleong, Lexy J.2010. Metode Penelitian Kualitatif: Edisi revisi. Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mardikanto & Soebianto, 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, Edisi Revisi

Soehartono, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Remaja Rosdakarya.2011.Bandung

Sumber Internet:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/21/15351701/update-bertambah-7300-kasus-covid-19-indonesia-kini-1278653-orang>

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta>

<https://banten.suara.com/read/2020/08/05/181425/perekonomian-banten-babak-belur-karena-pandemi-corona-di-triwulan-ii-2020?page=all>

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta>

<https://news.detik.com/berita/d-5244484/kabupaten-serang-lepas-predikat-pengangguran-tertinggi-di-bant>